

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
PENGUMUMAN  
PENDAFTARAN PENERIMAAN SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC*  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
TAHUN 2017

Panitia Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 264 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, mengundang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk mengusulkan anggota terbaik menjadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan:

1. warga negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
5. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1);
8. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun yang dapat terdiri dari:
  - a. pengalaman penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase);
  - b. kuasa hukum/pengacara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. pengurus SP/SB atau pengurus organisasi pengusaha (semua tingkatan);
  - d. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
  - e. pengelola SDM di perusahaan/organisasi;
  - f. dosen/tenaga pengajar hubungan industrial;
  - g. anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)/ Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial/Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
  - h. narasumber/pembicara seminar/lokarya/forum hubungan industrial lainnya.
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun;
10. tidak sedang menjabat sebagai:
  - a. anggota lembaga tinggi negara;
  - b. kepala daerah/kepala wilayah;
  - c. anggota lembaga legislatif tingkat pusat/daerah;
  - d. aparatur sipil negara;

- e. anggota TNI/Polri;
  - f. pengurus partai politik;
  - g. pengacara;
  - h. mediator/konsiliator/arbitrer; atau
  - i. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.
11. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

## B. Lamaran dan Pendaftaran

1. Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial provinsi melalui:
  - a. Apindo, untuk pelamar dari unsur pengusaha;
  - b. Serikat Pekerja/Serikat, Buruh untuk pelamar dari unsur pekerja.
2. Lamaran dilampiri:
  - a. fotokopi akte kelahiran atau akte kenal lahir;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - d. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
  - e. surat berkelakuan baik dari kepolisian;
  - f. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sebanyak rangkap 2 (dua);
  - g. pas photo berwarna dan terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - h. dokumen tanda berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun;
  - i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00;
  - j. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai: anggota lembaga tinggi negara, kepala daerah/wilayah, anggota legislatif tingkat pusat/daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pengurus partai politik, pengacara, mediator/konsiliator/arbitrer, atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00; dan
  - k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00.

## C. Pelaksanaan Pendaftaran

1. Pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan kepada Panitia Seleksi Daerah dengan alamat kantor/instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana lampiran I pengumuman ini.

2. Pengusulan pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dimulai pada tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 (10 hari kerja) pada jam kerja setempat.
3. Kebutuhan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat pada lampiran II pengumuman ini.

#### D. Proses Seleksi

1. Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. tes tertulis.
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan menempati peringkat terbaik yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi berhak mengikuti tes tertulis.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan pra tugas yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

#### E. Ketentuan Lain-Lain

1. Form usulan organisasi dan data peserta dapat diperoleh di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi atau *website* Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman: [www.naker.go.id](http://www.naker.go.id).
2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos dengan mencantumkan nomor telepon atau *handphone* pada sudut kanan atas surat permohonan maupun pada amplop surat.
3. Seleksi administrasi akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
4. Tes tertulis akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan diikuti oleh peserta dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur Apindo berdasarkan pembobotan dan ranking penilaian berkas seleksi administrasi.
5. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi maupun tes tertulis dapat dilihat pada papan pengumuman Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan *website* Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman [www.naker.go.id](http://www.naker.go.id)
6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.
7. Berkas permohonan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak akan dikembalikan dan menjadi dokumen Panitia Seleksi.
8. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun.
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 4 Oktober 2017

Panitia Seleksi

Calon Hakim Ad Hoc  
Pengadilan Hubungan  
Industrial

Lampiran I : Nama dan Alamat Dinas Ketenagakerjaan Seluruh Indonesia

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Prapatan No. 52 Jakarta Pusat.  
Telp. (021) 3847937, 3848303. Fax. (021) 3847937
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten  
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Banten  
Telp. (0254) 26111 Fax. (0254) 267112
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat  
Jl. Soekarno Hatta No. 532, Bandung  
Telp. (022) 7514598, 7507284, 7531187, 7564319  
Fax. (022) 7564072, 7564319
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Pahlawan No. 16, Semarang  
Telp. (024) 8451628 Fax. (024) 8311711, 8311713
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D I Yogyakarta  
Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282  
Telp. (0274) 885147, 885036 Fax. (0274) 885036
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  
Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya  
Telp. (031) 8282612, 8284078. Fax. (031) 8280245, 8280757, 8282612
7. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh  
Jl. Krueng Jambo Aye – Geuceu Komplek, Banda Aceh 23239  
Telp. (0651) 42115, 42621. Fax. (0651) 46798
8. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara  
Jl. Asrama No. 143, Medan  
Telp. (061) 8452551, 8452261, 8766225. Fax. (061) 8766225, 8452261
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Ujung Gurun No. 7, Padang 25114  
Telp. (0751) 27341, 27417, 31527. Fax. (0751) 36437, 27341
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau  
Jl. Pepaya No. 57-59, Pekanbaru  
Telp. (0761) 21733 Fax. (0761) 22285
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau  
Jl. D I Panjaitan Km. 8 No. 12 Tanjung Pinang  
Telp. (0771) 7007758. Fax. (0771) 443058
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi  
Jl. Jend. A. Tahlib No. 45 Telanaipura, Jambi 36124  
Telp. (0741) 62751. Fax. (0741) 62751

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu  
Jl. Pembangunan Padang Harapan No. 12  
Telp. (0736) 22823, 21082. Fax. (0736) 342422, 21282
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan  
Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 125, Palembang 30129  
Telp. (0711) 354013, 354657, 357293 Fax. (0711) 352083
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Jl. Pulau Pongok, Air Itam, Pangkal Pinang  
Telp. (0717) 439364 Fax. (0717) 439361
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung  
Jl. Gatot Subroto No. 28, Pahoman, Bandar Lampung  
Telp. (0721) 252605, 258630. Fax. (0721) 262856, 258630
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat  
Jl. A. Yani No. 6A, Pontianak 78124  
Telp. (0561) 712630 Fax. (0561) 712630
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan  
Jl. Jend. A. Yani Km. 6 No. 23, Banjarmasin 70249  
Telp. (0511) 3253680, 3260231, 3260232 Fax. (0511) 3263092
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah  
Jl. Yos Sudarso No. 02, Palangkaraya 73112  
Telp. (0536) 3221456, 3222652, 3238521. Fax. (0536) 3221884
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur  
Jl. Basuki Rahmad No. 1, Samarinda  
Telp. (0541) 743131, 757484, 757530. Fax. (0541) 739323, 735973
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara  
Jl. 17 Agustus, Rike Manado 95119  
Telp. (0431) 852933, 853080, 563280. Fax. (0431) 864309, 852833
22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah  
Jl. R.A. Kartini No.98, Palu 94112  
Telp. (0451) 421633, 421733. Fax. (0451) 421933.
23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo  
Jl. Andalas No. 7 B Kel. Paguyaman  
Telp. (0435) 830620, 823246. Fax. (0435) 830620, 823246
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara  
Jl. Made Sabara No. 1, Kendari 93111  
Telp. (0401) 3121312. Fax. (0401) 3121970, 3121424
25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat  
Jl. Martadinata No. 3, Mamuju 91312  
Telp. (0426) 22683. Fax. (0426) 22181, 21000
26. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 69, Makassar 90011

Telp. (0411) 586190, 590435, 586179. Fax. (0411) 586179, 586190

27. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Jl. Raya Puputan - Niti Mandala Renon, Denpasar 80235  
Telp. (0361) 225962, 225596, 223963 Fax. (0361) 226049, 756651
28. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Jl. Majapahit No. 29A, Mataram  
Telp. (0370) 632012 Fax. (0370) 632012
29. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Jl. El Tari II no. 336 Oebufu, Kupang 85361  
Telp. (0380) 832955, 822283. Fax. (0380) 832955
30. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku  
Jl. Philip Latumahina, Ambon 97126 Telp. (0911) 352620, 341079,  
311796. Fax. (0911) 353023, 311801
31. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara  
Jl. SKSD Palapa Kel. Kalumpang Tanah Mesjid, Ternate Telp. (0921)  
3110068. Fax. (0921) 3121900
32. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua  
Jl. Tanjung Ria Base-G No. 29, Jayapura  
Telp. (0967) 541687, 541693. Fax. (0967) 533779, 541679
33. Dinas Tenaga Transmigrasi dan Kerja Provinsi Papua Barat  
Jl. Percetakan Negara, Manokwari  
Telp. (0986) 2701508
34. Dinsosnakertrans Provinsi Kalimantan Utara  
Jl. Katamso, Tanjung Selor Hilir, Bulungan, Kalimantan Utara 77214,  
Telp. (0552) 20226611

Lampiran II : Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc  
Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2017

KEBUTUHAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

| No  | Pengadilan Hubungan Industrial | Kelas   | Kebutuhan Unsur |       | Total kebutuhan |
|-----|--------------------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
|     |                                |         | Apindo          | SP/SB |                 |
| 1.  | Banda Aceh                     | I . A   | 0               | 1     | 1               |
| 2.  | Makassar                       | I . A K | 1               | 0     | 1               |
| 3.  | Pangkalpinang                  | I . B   | 1               | 0     | 1               |
| 4.  | Palangkaraya                   | I . A   | 1               | 0     | 1               |
| 5.  | Pontianak                      | I A     | 1               | 0     | 1               |
| 6.  | Manado                         | I A     | 2               | 0     | 2               |
| 7.  | Jayapura                       | I A     | 1               | 1     | 2               |
| 8.  | Jambi                          | I A     | 1               | 1     | 2               |
| 9.  | Gorontalo                      | I B     | 1               | 1     | 2               |
| 10. | Bengkulu                       | I A     | 1               | 1     | 2               |
| 11. | Samarinda                      | I A     | 1               | 1     | 2               |
| 12. | Palu                           | I A     | 1               | 2     | 3               |
| 13. | Ternate                        | I B     | 2               | 2     | 4               |
| 14. | Mamuju                         | I B     | 2               | 2     | 4               |
| 15. | Kendari                        | I A     | 2               | 2     | 4               |
| 16. | Manokwari                      | II      | 2               | 2     | 4               |
| 17. | Ambon                          | I A     | 2               | 2     | 4               |
| 18. | Kupang                         | I A     | 2               | 2     | 4               |
| 19. | Mataram                        | I A     | 2               | 2     | 4               |
|     | TOTAL                          |         | 26              | 22    | 48              |

Format Formulir Usulan Calon Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial

KOP ORGANISASI PENGUSUL

Yth. Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc  
Pengadilan Hubungan Industrial  
Provinsi .....  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran penerimaan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan usulan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dari unsur Pengusaha/Pekerja/Buruh \*)

Daftar nama calon yang diusulkan :

| No  | Nama  | Alamat Tempat Tinggal | Data **) Pendukung |
|-----|-------|-----------------------|--------------------|
| 1   | ..... | .....                 | Terlampir          |
| 2   | ..... | .....                 | Terlampir          |
| Dst |       |                       |                    |

Demikian usulan dari kami, untuk dapat diproses lebih lanjut.

.....,.....

Organisasi Pengusul

(Meterai Rp. 6.000)

.....

\*) Coret yang tidak sesuai;

\*\*) Data pendukung terdiri dari Data Calon Peserta